



RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

JALAN HANG TUAH NO. 08 BENGKALIS KODE POS : 28712 TELEPON (0766) 23645 FAX. (0766)
23644 EMAIL : DPPKBBENGKALIS@GMAIL.COM WEBSITE : WWW.DISDALDUK-
KB.BENGKALISKAB.GO.ID



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan merujuk pada pasal 6 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 272 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dinamakan sebagai Rencana Strategis (Renstra) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Pada pasal 272 ayat (2) Undang-Undang 23 tahun 2014 disebutkan bahwa “Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah”.

Di tingkat nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019 – 2024, selain itu mengacu pada Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 150 ayat 3 point (b) Tentang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kabupaten Bengkalis telah memiliki RPJMD periode tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah daerah. Sesuai dengan peraturan perundangan, RPJMD Kabupaten Bengkalis memuat visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Riau serta RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan rencana pembangunan berskala Kabupaten yang juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan wahana untuk menyatukan pandangan seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun.

Sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis, Renstra selanjutnya dioperasionalkan melalui konsolidasi Perangkat Daerah, disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Renstra ini disusun melalui proses analisis potensi, permasalahan serta memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, dan mengkaji isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis ini juga disusun dengan menyelaraskan pada Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 dan BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok sebagai berikut: “Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 6) Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2015 – 2019;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;



- 8) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Nomor : 199 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 ;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2021-2026;
- 10) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 11) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis ini dimaksudkan sebagai perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Bengkalis sesuai amanah pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.



1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- a. Merupakan dokumen operasional indikatif RPJMD Kabupaten Bengkalis, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Dasar penyusunan kebijakan dan rencana kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- c. Pedoman untuk keterpaduan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- d. Pengendali kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
- e. Pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS



Bab ini meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sumber Daya Pengendalian Penduduk Dan KB, Kinerja Pelayanan Pengendalian Penduduk Dan KB, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pengendalian Penduduk Dan KB.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bab ini meliputi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Pengendalian Penduduk Dan KB, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, Telaahan Renstra BKKBN Pusat, dan Renstra Terkait dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini meliputi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupten Bengkalis.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok sebagai berikut: “Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan daerah dan tugas pembantuan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

mempunyai tugas sebagai berikut :

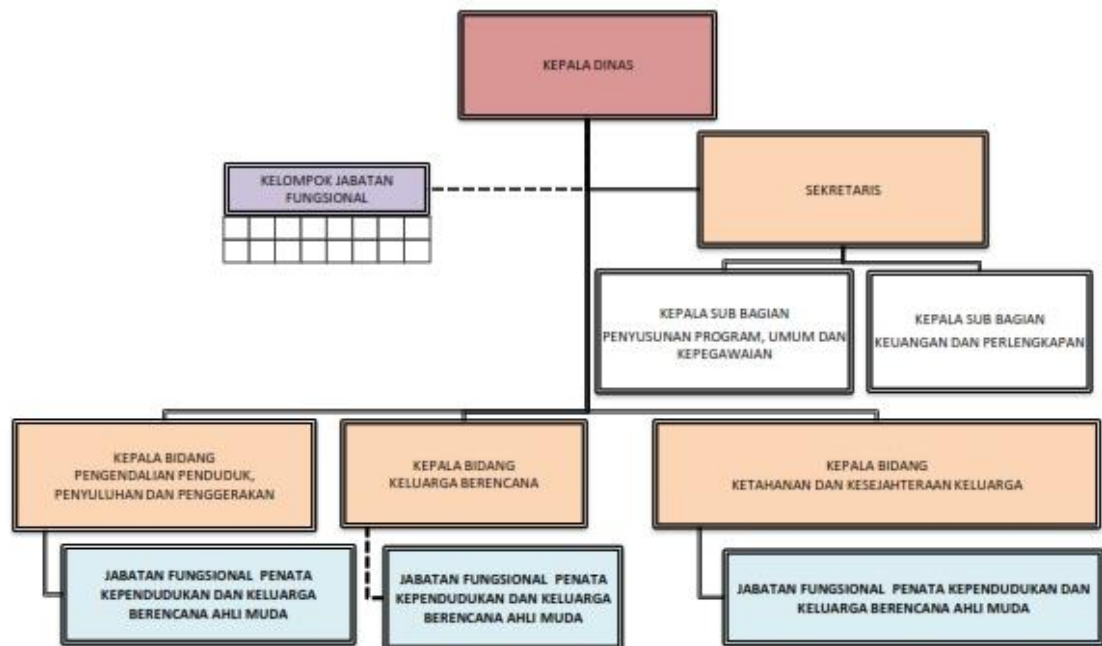
- a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



2.1.3 Struktur Organisasi DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS

LAMPIRAN : PERBUP KABUPATEN BENGKALIS
Nomor : 100 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021





2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang ditugaskan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hingga tahun 2021 ini jumlahnya 43 orang. Jumlah ASN menurut golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Komposisi ASN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	Sekretariat	9	6	15
2	Bidang Keluarga Berencana	3	5	8
3.	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6	4	10
4.	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	5	5	10
	TOTAL	23	20	43

Sumber: DISDALDUK & KB Kabupaten Bengkalis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 43 orang ASN dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, 23 orang (53%) adalah laki-laki dan 20 orang (47%) adalah perempuan. Jumlah ASN yang tersedia masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Administrasi.



Tabel 2.2

Komposisi ASN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN					JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	SMA	
1.	Sekretariat	-	1	7	1	6	15
2	Bidang Keluarga Berencana	-	3	3	1	1	8
3.	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	1	4	1	3	9
4.	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	-	1	5	1	3	10
	TOTAL		6	19	4	13	43

Sumber: DISDALDUK & KB Kabupaten Bengkalis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan SMA yaitu sejumlah 13 orang atau sebesar 30%, D3 sejumlah 4 orang atau 9%, S1 yaitu sejumlah 19 orang atau sebesar 44%, dan S2 sejumlah 6 orang atau sebesar 14%. Dilihat dari tingkat pendidikan, masih diperlukan penambahan ASN lulusan sarjana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, dan dilihat sebagian besar adalah golongan III yaitu mencapai 24 orang atau 56%, dan terdapat golongan II berjumlah 10 orang atau 23 %, sedangkan golongan IV sebanyak 6 orang atau 14 %.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Berdasarkan Eselon

No	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II a	1	-	1
2	Eselon III a	1	-	1
3	Eselon III b	2	1	3
4	Eselon IV a	3	8	11
Jumlah		7	9	16

Sumber: DISDALDUK & KB Kabupaten Bengkalis, 2021

Jumlah PNS perempuan berdasarkan jenis jabatan jumlah perempuan ada 9 orang dan laki-laki 7 orang. Berdasarkan pangkat jumlah laki laki lebih banyak dari perempuan. Dari total pegawai 43 orang perempuan ada 19 orang dan laki-laki hanya 23 orang. Selengkapnya disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Jenis Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV c	1	-	1
2	IV b	1		1
3	IV a	5	2	7
4	III d	3	3	6
5	III c	1	5	6
6	III b	3	6	9
7	III a	1	2	3
8	II d	6	2	8
9	II c	2	-	2
10	II b	-	-	-
11	II a	-	-	-
Jumlah		23	20	43

Sumber: DISDALDUK & KB Kabupaten Bengkalis, 2021



Tabel 2.5
Komposisi PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis
Menurut Usia

N O	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumla h
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
1	Sekretariat	-	-	1	5	4	1	4	15
2	Bidang Keluarga Berencana	-	-	-	2	1	1	4	8
3	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	1	3	2	1	3	10
4	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	-	-	1	2	3	2	2	10
	JUMLAH	0	0	3	12	10	5	13	43

Sumber: DISDALDUK & KB Kabupaten Bengkalis, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis masih di dominasi oleh usia 41-> 50 tahun sebanyak 15 orang atau (67.26%) sedangkan usia <41 tahun sebanyak 15 orang atau (28.73%).



2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sumber daya asset/modal yang saat ini adalah merupakan sarana prasarana yang dimiliki berupa barang inventaris/sarana prasarana dari DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut;

1. Kendaraan Dinas jabatan roda 4 sebanyak 5 unit.
2. Kendaraan distribusi ALOKON roda 4 sebanyak 1 unit.
3. Kendaraan Muyan (Bus) roda 4 sebanyak 1 unit
4. Gedung Kantor beserta isinya.
5. Gudang Alokon beserta kelengkapannya.
6. Balai Penyuluhan KB Kecamatan beserta kelengkapannya.

Tabel 2.5

Sumber Daya Asset/Modal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
1	Tanah dan Bangunan Kantor	4025 m2 & 600 m2	
2	Mobil	7	
3	Motor	2	
4	Gerobak dorong	1	
5	Rak penyimpanan	2	
6	Mesin ketik manual	2	
7	Mesin hitung manual	1	
8	Mesin foto copy	3	
9	Lemari besi	4	
10	Rak besi	2	
11	Filling besi	2	
12	Brankas	1	
13	Lemari kaca	3	
14	Lemari kayu	1	
15	Alat penghancur	5	



No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
16	White board	2	
17	Infocus	1	
18	Mesin pompa air	1	
19	Meja rapat	1	
20	Meja tulis	6	
21	Meja reseption	1	
22	Kursi tamu	1	
23	Kursi tangan	2	
24	Kursi putar	6	
25	Kursi lipat	1	
26	Meja computer	2	
27	Sofa	3	
28	Alat pengukur waktu	1	
29	Lemari es	1	
30	AC Split	9	
31	Kipas angin	1	
32	Kompor gas	1	
33	Kitchen set	1	
34	Tabung gas	2	
35	Televisi	4	
36	Loud speaker	1	
37	Sound system	4	
38	Meja jahit	1	
39	Dispenser	1	
40	Handy cam	1	
41	Alat rumah tangga	4	
42	Komputer PC	17	
43	Leptop	7	
44	Notebook	12	
45	Peralatan computer	1	
46	Printer	14	
47	Meja pejabat Eselon II	1	

No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
48	Meja pejabat Eselon III	3	
49	Meja pejabat Eselon IV	11	
50	Kursi meja pejabat Eselon II	1	
51	Kursi meja pejabat Eselon III	3	
52	Kursi meja pejabat Eselon IV	11	
53	Lemari arsip	2	
54	Lemari lainnya	1	
55	Camera + attachment	2	
56	Proyektor attachment	2	
57	Unintemuuptible power supply	23	
58	Kamera elektorik	1	
59	Lensa camera	1	
60	Intermediate telephony	1	
61	Mesin board	0	
62	Mesin jahit overlock	1	
63	Alat pemadam kebakaran	1	
64	CCTV	1	

2.2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 adalah sebesar 521.083 jiwa dan kemudian meningkat menjadi 698.578 jiwa pada tahun 2025. Jumlah Penduduk paling banyak di Kabupaten Bengkalis berada di Kecamatan Mandau sebesar 136.435 jiwa sementara yang paling sedikit adalah sebesar 14.802 jiwa dan berada di Kecamatan Rupert Utara.



Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per
Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun
	2019	2020	%
1. Mandau	150.806	152.258	0,86
2. Pinggir	60.936	62.098	3,39
3. Bukit Batu	20.945	21.771	3,25
4. Siak Kecil	24.119	24.186	0,51
5. Rupat	33.116	34.719	3,36
6. Rupat Utara	13783	14.117	10,79
7. Bengkalis	82.111	83.085	-0,25
8. Bantan	41.472	41.907	-2,06
9. Bandar Laksamana	14.957	15.842	5,16
10. Bhatin Solapan	88.953	91.586	2,64
11. Talang Muandau	22.740	24.000	5,85
Jumlah	553.938	565.569	1,80

Sumber data: BPS Bengkalis, 2021

Adapun Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 1,67 persen. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang paling tinggi berada di Kecamatan Rupat Utara yaitu sebesar 10,79 persen sementara yang paling rendah adalah di Kecamatan Bengkalis yaitu sebesar 0,25 persen (BPS Bengkalis, 2021).

b. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk di bawah lima tahun atau Balita di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 adalah sebanyak 61.863 jiwa atau sekitar 11,37 persen dimana dari jumlah tersebut terdiri dari 31.286 jiwa penduduk laki-laki dan 30.577 jiwa adalah penduduk perempuan. Jumlah penduduk remaja yaitu penduduk yang berusia 10-24 tahun adalah sebanyak 146.050 atau sebanyak 26,84 persen dari total seluruh penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.



Adapun untuk penduduk usia tidak produktif yaitu penduduk usia di bawah 15 tahun dan juga penduduk usia di atas 64 tahun sebanyak 189.034 atau sebanyak 34,74 persen. Dari 189.034 penduduk tidak produktif tersebut terdiri dari 172.997 jiwa penduduk yang berusia 0-14 tahun dan sejumlah 16.037 jiwa merupakan penduduk usia 65+. Penduduk usia produktif di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 adalah sebanyak 354.953 jiwa atau sebesar 65,25 persen.

Tabel 2.7.

Jumlah penduduk per kelompok umur di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
	31.286	30.577	61.863
	29.781	27.912	57.693
10-14	27.550	25.891	53.441
15-19	24.919	22.934	47.853
20-24	22.513	22.243	44.756
25-29	23.717	23.330	47.047
30-34	23.474	23.181	46.655
35-39	23.140	21.761	44.901
40-44	20.506	18.279	38.785
45-49	16.413	14.610	31.023
50-54	12.452	11.594	24.046
55-59	9.326	8.766	18.092
60-64	6.256	5.539	11.795
65-69	3.809	3.630	7.439
70-74	2.247	2.295	4.542
75+	1.866	2.190	4.056
Jumlah	279.255	264.732	543.987

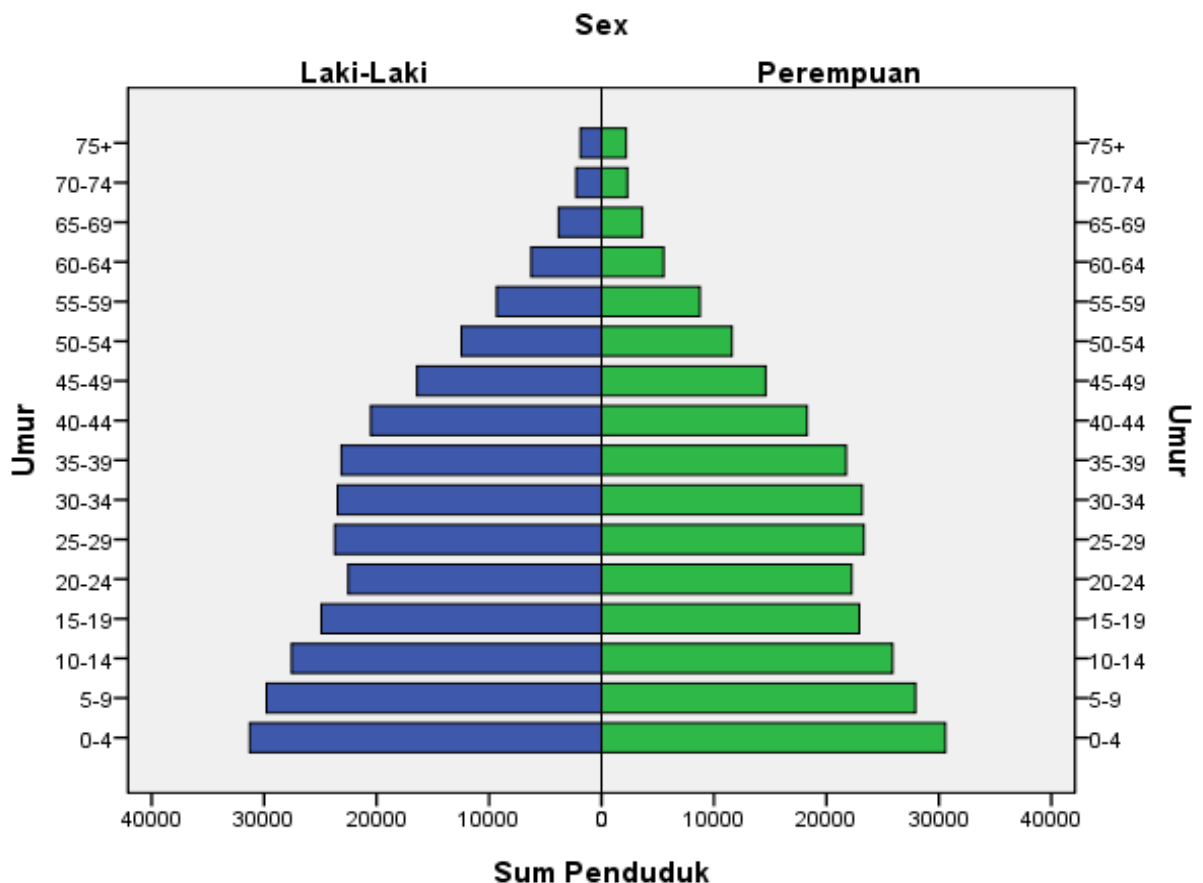
Sumber : BPS Bengkalis 2021

Jika diperbandingkan antara penduduk produktif dan penduduk tidak produktif maka akan diketahui angka ketergantungan atau dependency ratio penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 yaitu sebesar 53,26. Ini menunjukkan bahwa ada sebanyak 53-54 penduduk usia tidak produktif di tanggung 100 penduduk usia produktif.



Dengan demikian di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 belum mencapai bonus demografi karena bonus demografi mempersyaratkan angka ketergantungannya berada di bawah 50.

Gambar 2.1
Piramida Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2021



Sumber: Bengkalis dalam Angka Tahun 2021

c. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 adalah sebesar 105 yang artinya bahwa ada sebanyak 105 penduduk laki-laki berbanding 100 penduduk perempuan.



Tabel 2.8.
Rasio jenis kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1. Mandau	123.665	115.848	239.513	105
2. Pinggir	44.490	42.045	86.535	106
3. Bukit Batu	16.727	16.113	32.840	103
4. Siak Kecil	10.419	9.801	20.220	105
5. Rupat	16.982	16.081	33.063	105
6. Rupat Utara	7.303	6.898	14.201	105
7. Bengkalis	39.876	38.695	78.571	103
8. Bantan	19.793	19.251	39.044	105
9. Bandar Laksamana	9.004	8.480	17.484	107
10. Bathin Solapan	54.314	51.196	105.510	106
11. Talang Muandau	15.684	14.579	30.263	109
Jumlah	319.283	304.624	624.231	105

Sumber data: BPS Bengkalis tahun 2021

Kecamatan dengan Rasio Jenis Kelamin paling tinggi adalah Kecamatan Bandar Laksamana dengan Rasio Jenis Kelamin sebesar 107 yang berarti ada sebanyak 107 penduduk laki-laki berbanding dengan 100 orang penduduk perempuan. Adapun untuk rasio jenis kelamin yang paling rendah ada di dua kecamatan yaitu berada di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bukit Batu dengan rasio jenis kelamin sebesar 103 yang artinya ada sebanyak 103 penduduk laki-laki berbanding dengan 100 orang penduduk perempuan.

d. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah sebesar 8.426.48 KM² dengan jumlah penduduk sebesar 565.569 orang maka kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 67,12 orang/KM².



Tabel 2.9.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021

Kecamatan	Luas Area		Penduduk		Kepadatan Penduduk
	Km 2	%	Jumlah	%	Orang/Km2
1. Mandau	372.25	4.42	152.258	26.92	409.02
2. Pinggir	811.46	9.63	62.098	10.98	76.53
3. Bukit Batu	526.62	6.25	21.771	3.85	41.34
4. Siak Kecil	957.95	11.37	24.186	4,28	25.25
5. Rupat	1.136.31	13.48	34.719	6.14	30.55
6. Rupat Utara	378.68	4.49	14.117	2,50	37.28
7. Bengkalis	514,00	14,61	83.085	14,69	79.74
8. Bantan	442.93	5.26	41.907	7,41	94.61
9. Bandar Laksamana	1.237.70	14.69	15.842	2,80	12.8
10. Bhatin Solapan	855.62	10.15	91.586	16,19	107.04
11. Talang Muandau	1.244.71	14.77	24.000	4,24	19.28
Jumlah	8.426.48	100,00	565.569	100,00	67.12

Sumber data: BPS, Bengkalis tahun 2021

Kecamatan di Kabupaten Bengkalis dengan tingkat kepadatan penduduk paling padat adalah Kecamatan Mandau dengan tingkat kepadatannya adalah sebesar 409.02 orang/ KM² kemudian diikuti oleh Kecamatan Bhtin Solapan dengan tingkat kepadatan penduduk adalah sebesar 107.04 orang/KM². Adapun kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya berada di Kecamatan Bandar Laksamana yaitu hanya 12.8 orang/KM².

e. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan atau Rasio Ketergantungan (dependency ratio) adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif.

Pada Tahun 2021 penduduk Kabupaten Bengkalis yang berumur 0-14 tahun adalah sebesar 172.997 jiwa.



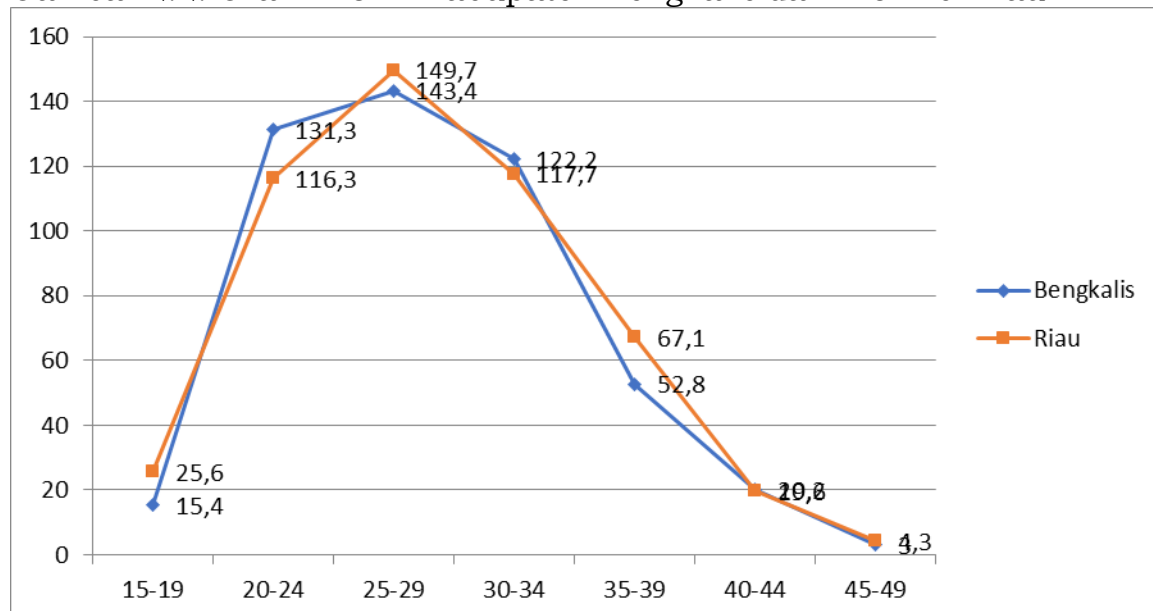
Sementara penduduk di Kabupaten Bengkalis yang berumur lebih dari 65 Tahun adalah sebesar 16.037 jiwa dan yang berumur antara 15 - 64 tahun adalah sebesar 354.953 jiwa. Berdasarkan angka – angka ini maka angka beban ketergantungan penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 adalah sebesar 53,26 yang berarti bahwa setiap 100 orang produktif menanggung 53 s.d 54 orang penduduk tidak produktif. Ini berarti bahwa di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 belum memasuki era bonus demografi

f. *Age Spesific* dan Keluarga Berencana

Age Spesifik Fertility Rate (ASFR) adalah banyaknya jumlah kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada suatu kelompok umur tahun tertentu per 1.000 perempuan pada kelompok umur pertengahan tahun yang sama.

Age Spesifik Fertility Rate (ASFR) untuk kelompok umur 15-19 tahun adalah sebanyak 15,4 kelahiran yang artinya ada sebanyak 15 sampai dengan 16 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun.

Gambar 2.2. Grafik ASFR Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau



Sumber : data Susenas diolah (BKKBN RI dan BPS, 2020).



Adapun untuk ASFR usia 20-24 tahun di Kabupaten Bengkalis sebanyak 131,3 kelahiran per 1.000 perempuan usia 20-24 tahun. Kemudian untuk ASFR kelompok umur 25-29 tahun adalah sebanyak 143,4 kelahiran per 1.000 perempuan usia 25-29 tahun.

Untuk ASFR kelompok umur 30-34 tahun adalah sebanyak 122,2 kelahiran dari 1.000 perempuan usia 30-34 tahun. Sementara itu untuk ASFR kelompok umur 35-39 tahun ada sebanyak 52,8 kelahiran per 1.000 perempuan usia 35-39 tahun. Adapun untuk ASFR kelompok umur 40-44 tahun adalah sebanyak 20,2 kelahiran per 1.000 perempuan usia 40-44 tahun. Sedangkan ASFR kelompok umur 45-49 tahun adalah sebanyak 3,0 kelahiran per 1.000 perempuan usia 45-49 tahun.

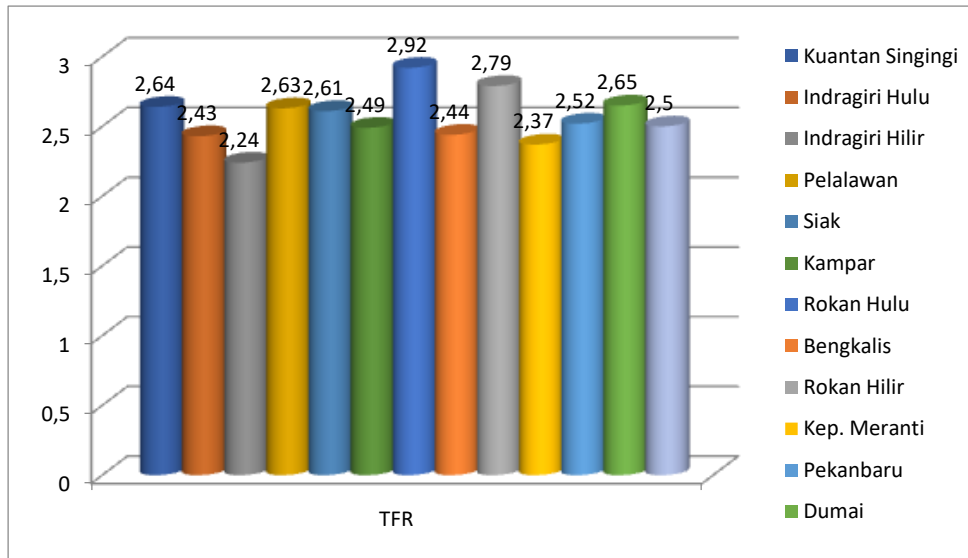
Dari angka-angka ASFR di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat angka kelahiran pada kelompok usia remaja terutama pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 15,4 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun dan ada sebanyak 131,3 kelahiran per 1.000 perempuan kelompok umur 20-24 tahun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa perkawinan dan kehamilan remaja masih.

g. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.



Gambar 2.10. Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Riau



Total Fertility Rate Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 2,44 anak per perempuan selama rentang masa waktu reproduksinya yaitu perempuan yang berusia 15 – 49 Tahun. Angka ini sebetulnya masih di bawah angka Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Riau pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,5 anak per perempuan selama rentang waktu masa reproduksinya yaitu usia 15-49 tahun.

h. Kontrasepsi Prevalensi Rate

Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang memakai alat/obat/metode kontrasepsi suatu cara adalah sebesar 56,9 persen, sementara dengan suatu cara modern adalah sebesar 56,3 persen.



Tabel 2.11.
Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Bengkalis

Pemakaian Kontrasepsi	Persentase
Suatu Cara	56,9
Suatu Cara Modern	56,3
MKJP	8,5
MOW	0,6
MOP	0,1
IUD	4,3
Suntik	28,1
Implant	3,4
Pil	17,1
Kondom	2,6
Pantang Berkala	0,5
Lainnya	0,2

Sumber: Disdalduk dan KB tahun 2021

Dari angka pemakaian kontrasepsi suatu cara yang berjumlah 56,9 persen tersebut terbagai berbagai macam metode, alat dan obat kontrasepsi yaitu MOW sebesar 0,6 persen, MOP sebesar 0,1 persen, IUD sebesar 4,3 persen, suntik sebesar 28,1 persen, implant sebesar 3,4 persen, pil sebesar 17,1 persen, kondom sebesar 2,6 persen, pantang berkala sebesar 0,5 persen dan lainnya adalah sebesar 0,2 persen. Dengan demikian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang dipakai Pasangan Usia Subur di Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 8,5 persen.

Berdasarkan capaian kinerja di atas tersebut, kinerja Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021, yang diukur berdasarkan hasil capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra sebagai berikut:



Tabel 2.12.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun ke-						Rasio Capaian tahun Ke-					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Persentase Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	-	-	1,65%	1,64%	1,63%		-	-	1,59%	1,28%	1,51%		-	-	96,36%	78,04%	92,63%	
Kepadatan Penduduk KM 2	-	-	-	74	74		-	-	-	68%	68%		-	-	-	91,89%	91,89%	
Persentase Menurunnya Angak Kelahiran Total (TFR)	-	-	2,53%	2,52%	2,51%		-	-	2,79%	2,78%	2,78%		-	-	110,27%	110,31%	110,76%	
Meningkatnya Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	-	-	63%	64%	65%		-	-	56,65%	63,68%	68,25%		-	-	89,92%	99,5%	105%	
Meningkatnya Persentase Kesertaan KB baru	-	-	65,7%	65,9%	66,0%		-	-	68,25%	74,13%	56,03%		-	-	103,88%	112,49%	84,89%	
Jumlah Kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) yang aktif	-	-	70	-	-		-	-	160%	-	-		-	228,58%	-	-	-	
Persentase jumlah Kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) yang aktif	-	-	1,90%	45%	50%		-	-	105,7%	160%	50,78%	-	-	-	5.563,15%	355,56%	101,56%	
Jumlah Kelompok PIK-R	-	-	1,90%	-	-		-	-	62%	-	-	-	-	3.263,15%	-	-	-	
Persentase Kelompok PIK-R aktif	-	-	67%	45%	50%		-	-	60%	85,45%	47%	-	-	89,55%	189,89%	189,89%	94%	
Predikat Akuntabilitas Kinerja	-	-	B	B	B	-	-	-	CC	C	C	-	-	C	C	C	C	





Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020 dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020 dapat mencapai target-target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi yang dapat dioptimalkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang.

2.2.4 Capaian Kinerja Pendanaan

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Berikut tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020:

Tabel 2.13.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.924.913.359	1.644.394.400	1.606.754.304	1.468.619.570		-	1.728.857.190	1.521.994.427	1.305.073.548	3.269.850.986	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	661.411.980	279.000.000	776.696.000	360.000.000		-	621.579.606	184.341.892	668.216.913	357.452.443	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	100.000.000	495.972.300	846.300.000	640.000.000		-	98.488.500	477.409.300	586.700.000	594.500.000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	39.700.000	3.759.100	-	47.400.000		-	34.053.500	-	-	47.400.000	
Program Keluarga Berencana	-	2.317.916.975	1.843.668.300	2.034.428.898	1.479.165.000		-	1.976.184.846	1.666.086.548	1.804.590.720	1.337.447.858	



Program Pelayanan Kontrasepsi	-	381.004.200	268.451.800	487.884.000	21.908.300		-	353.219.200	253.748.800	380.235.000	21.908.300	
Program Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	-	980.696.500	2.784.287.900	4.167.025.700	2.484.839.000		-	791.536.932	2.061.648.910	3.642.425.200	1.821.356.825	
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	-	384.232.500	613.927.500	792.487.490	-		-	304.858.100	579.280.500	632.410.950	-	



Berdasarkan tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020 dapat dilihat bahwa Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020 dapat mencapai target-target yang ditetapkan.



2.2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelayanan.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada lima tahun mendatang mengemukakan berbagai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang di Butuhkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis:

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.
2. Menurunkan angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang selalu meningkat tiap tahun;
3. Menurunkan angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun.
4. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR).
5. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need).
6. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun).



7. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS 15-49 tahun.
8. Pemahaman masyarakat terutama di pedesaan terkait program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga);

b. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Adanya komitmen Pemerintah pusat untuk menyusun kebijakan tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Komitmen pemerintah pusat mewujudkan program Bangga Kencana di daerah dengan dukungan teknis dan anggaran melengkapi kebutuhan sarana dan prasana KB.
3. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis di buktikan dengan program-program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, (Bangga Kencana) di Kabupaten Bengkalis melalui RPJMD 2021-2026.
4. Adanya jaringan kerja dalam pelaksanaan dinas dari Tingkat Kabupaten sampai Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, RT untuk peningkatan dan menyukseskan program Bangga Kencana.
5. Tingginya partisipasi dari fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bengkalis.
6. Kecenderungan menikah di usia muda bagi anak perempuan.
7. Kesadaran dari pemuka masyarakat dan tokoh agama pentingnya program Bangga Kencana di Kabupaten Bengkalis. Dilihat dari diaktifkannya Forum Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.



Berikut ini merupakan tabel faktor internal (kelemahan dan kekuatan) dan faktor eksternal (tantangan dan ancaman) dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.14.
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (KEKUATAN DAN KELEMAHAN)

INTERNAL	
KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
• Adanya SOTK, Standar pelayanan dan SOP; • Adanya UPT/Fasilitas Kesehatan di setiap kecamatan; • Adanya petugas lapangan Keluarga Berencana Desa/Kelurahan); • Adanya Mobile Layanan Program KB; • Adanya Pemanfaatan teknologi informasi sistem Informasi Keluarga (NEW SIGA) • Adanya Balai Penyuluh di setiap Kecamatan.	• Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pelayanan; • Terbatasnya sarana dan prasarana; • Masih rendahnya komitmen dan integritas sebagian pegawai dalam pembinaan dan penyuluhan Program KB; • Masih lemah nya Pemanfaatan Teknologi Sisitim Informasi Keluarga • Masih kurang nya Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

TABEL 2.15
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (TANTANGAN DAN PELUANG)

EKSTERNAL	
TANTANGAN (T)	PELUANG (O)
▪ Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016	▪ Adanya komitmen Pemerintah pusat untuk menyusun kebijakan tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.



menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana. ▪ Menurunkan angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang selalu meningkat tiap tahun; ▪ Menurunkan angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun. ▪ Meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR). ▪ Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>). ▪ Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun). ▪ Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS 15-49 tahun. ▪ Pemahaman masyarakat terutama di pedesaan terkait program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga);	▪ Komitmen pemerintah pusat di dalam penyediaan dana alokasi khusus (DAK) Bidang Kesehatan subbidang Keluarga Berencana. Sehingga sangat membantu Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan peran KKBPK di daerah dengan bantuan DAK untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasana KB. ▪ Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis di buktikan dengan adanya program-program khusus untuk meningkatkan KKBPK di Kabupaten Bengkalis melalui RPJMD 2021-2026. ▪ Adanya jaringan kerja dalam pelaksanaan dinas dari Tingkat Kabupaten sampai Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, RT untuk peningkatan dan menyukseskan program KKBPK. PPKBD dan Sub PPKBD. ▪ Tingginya partisipasi dari faskes-faskes yang ada di Kabupaten Bengkalis. ▪ Kebiasaan /adat untuk menikah di usia muda bagi anak perempuan khususnya di pedesaan. ▪ Kesadaran dari pemuka masyarakat dan tokoh agama pentingnya program KKBPK di Kabupaten Bengkalis. Dilihat dari diaktifkannya FAPSEDU tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.
---	---



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Masalah dan isu-isu strategis yang menyangkut tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis merupakan acuan dasar untuk menentukan prioritas dan strategi yang harus dilakukan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perencanaan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya dari tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang merupakan SKPD awal sebelum dilakukan pemisahaan tugas dan fungsinya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Lima tahun Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Bengkalis sebelumnya telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang telah direncanakan sehingga bermuara pada optimalisasi pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi.



Tabel 3.1

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok fungsi pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih Rendahnya Kualitas Penduduk	angka kematian yang masih tinggi	persebaran dan mobilitas penduduk yang tidak merata
	Angka kemiskinan yang masih besar jumlahnya	tingkat pendidikan yang masih rendah
Rendahnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rendahnya Pendapatan	pembinaan keluarga (BKB, BKR dan BKL)
	Rendahnya pendidikan	
Laju Pertumbuhan Penduduk	Tingginya angka kelahiran	Rendahnya akseptor KB tidak memakai Alat Kontrasepsi
		Kurangnya petugas lapangan

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target. Berikut ini adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis adalah:



1. Masih Rendahnya Kualitas Penduduk

Penduduk Kabupaten Bengkalis berjumlah 565.569 jiwa pada tahun 2020 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah sebesar 2.10 persen. Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tertinggi berada di Kecamatan Bandar Laksamana yaitu sebesar 5.92 persen dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) terendah berada di Kecamatan Siak Kecil yaitu sebesar 0.28 persen. (BPS Kabupaten Bengkalis, 2020).

Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bengkalis tidak diikuti dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 71,29 dan di atas rata-rata Provinsi Riau yaitu sebesar 70,84. Kualitas penduduk yang masih rendah ini antara lain ditandai dengan angka kematian yang masih tinggi, tingkat pendidikan yang masih rendah, serta angka kemiskinan yang masih besar jumlahnya. Dari sisi persebaran dan mobilitas penduduk yang tidak merata antar kecamatan di Kabupaten Bengkalis dan juga antara penduduk yang tinggal di perdesaan dan yang tinggal di perkotaan.

Penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah serta diiringi dengan laju pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan.



Sebaliknya, keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas penduduk akan mendorong pembangunan di semua aspek dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

2. Rendahnya Peran Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Belum dirangkulnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan keluarga (BKB, BKR dan BKL), pembinaan remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga dan peningkatan pendapatan keluarga melalui UPPKS. Sehingga bidang tersebut bergerak secara mandiri dan tidak adanya pembinaan akibatnya hasil yang didapat belum optimal dan tidak tepat guna.

Fungsi ketahanan keluarga sangat besar dalam menghasilkan kualitas manusia, karena manusia secara individu dibesarkan dalam suatu keluarga.

3. Belum optimalnya penyuluhan KB (PKB/PLKB) serta ketersediaan sarana prasarana pelayanan KB

Kebanyakan keluarga kurang mempunyai perencanaan yang matang tentang bagaimana mengelola rumah tangga khususnya kemampuan dalam mempunyai anak beserta pemenuhan segala kebutuhannya. Sehingga yang terjadi justru rumah tangga tersebut dengan ekonomi yang pas-pasan namun mempunyai banyak anak yang berujung pada kurang terpenuhinya hak anak khususnya kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak. Masalah kesehatan reproduksi masih menjadi hal yang tabu dikalangan masyarakat.



Keengganan masyarakat akan pengetahuan kesehatan dan pendidikan reproduksi masih cukup tinggi. Stigma masyarakat terhadap aktifitas konsultasi akan kesehatan reproduksi justru sering dianggap sebagai hal bersifat negatif dan memalukan, bahkan sering memunculkan perasangka yang negatif dari masyarakat disekitarnya. Hal tersebut masih ditambah dengan kurangnya pembinaan dan penyuluhan tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Hal ini membuat masih banyaknya kasus-kasus kesehatan reproduksi yang tidak tertangani secara cepat dan tepat yang menyebabkan di Kab. Bengkalis angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, dan kematian balita menjadi cukup tinggi.

3.2. Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Bengkalis serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 adalah:

***"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang
Bermarwah, maju dan Sejahtera"***

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, yaitu sebagai berikut:



Misi Pertama, Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.

Misi Kedua, Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai Nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.

Misi Ketiga, Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.

Misi ini diarahkan untuk bisa memberdayakan semua potensi pendapatan daerah, termasuk aset daerah, BUMD; mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah; serta peningkatan upaya lainnya untuk memajukan perekonomian daerah dan masyarakat.

2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.

Misi ini diarahkan untuk menata birokrasi menuju good governance dan clean government; meningkatkan nilai-nilai agama di masyarakat; penguatan nilai-nilai budaya melayu sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter nilai yang kuat.



3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Misi ini diarahkan untuk menyediakan infrastruktur perhubungan, jalan, air, energi, dan lingkungan serta membangun wilayah perbatasan supaya masyarakatnya sejahtera.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis termasuk pada Misi ke-1 yaitu **“Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian”** Dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian serta birokrasi yang bersih, melayani dan menggerakkan masyarakat sehingga terciptanya pelayanan publik yang baik dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan strateginya adalah **“Peningkatan kualitas Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.”**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, adapun yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain:



1. Faktor Penghambat:

- a. Kuantitas dan Kualitas SDM masih belum memadai;
- b. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai

2. Faktor Pendorong

- a. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;
- b. Tersedianya SOP dan Standar Pelayanan untuk mendukung operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Mempunyai regulasi untuk mendukung Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana.

Berikut merupakan tabel visi, misi, tujuan, sasaran program prioritas dan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 dapat dilihat pada halaman berikut :

Tabel 3.3
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis 2021-2026

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA											
Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian											
1.2	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	73,46	74,06	74,47	74,88	75,30	75,71	76,12	76,12
	1.2.1	Terwujudnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing	Rata rata Lama Sekolah	9,69	9,88	10,15	10,37	10,62	10,85	11,1	11,1
	1.2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,2	71,36	71,55	71,71	71,86	72,03	72,2	72,2



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berperan dalam mengemban pencapaian misi 1, yaitu : (i) membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing melalui upaya pengendalian penduduk, pembinaan keluarga dan pembangunan keluarga sekaligus melakukan pendataan pertambahan penduduk baik melalui kelahiran maupun in-migrasi. (ii) Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun NON - MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi; c) meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga.

Faktor-faktor yang merupakan penghambat dalam pelaksanaan tugas ini umumnya adalah adanya keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang kurang memiliki kompetensi dan juga dana. Sedangkan faktor pendorongnya adalah sudah berlangsungnya kerjasama dengan berbagai lembaga lain, baik didalam pemerintahan maupun non pemerintah.



Tabel 3.4.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera ”				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian			
	- Program Pelayanan Keluarga Berencana	Pelayanan dan sosialisasi kurang optimal	Keterbatasan dana dan SDM	Ada kerjasama dengan lembaga lain
	- Program Pelayanan Kontrasepsi	Pelayanan dan sosialisasi kurang optimal	Keterbatasan dana dan SDM	Ada momentum penganjuran KB dan kerjasama dengan lembaga lain
	- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Advokasi dan KIE kepada Masyarakat yang tidak maksimal	Ketidak sediaan PLKB berstatus PNS	Pemberdayaan mitra kerja seperti TOGA, TOMA dan TODA di Kab.Bengkalis
	- Program Pengembangan	Pelayanan	Keterbatasan	Ada



	Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	dan sosialisasi kurang optimal	n dana dan SDM	kerjasama dengan lembaga lain
--	---	--------------------------------	----------------	-------------------------------

3.3. Telaahan Renstra BKKBN Pusat

Renstra tingkat nasional yang juga menjadi acuan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis adalah Renstra Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Prinsip-prinsip dasar pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 6 (enam) aspek penting, yaitu:

1. Mewujudkan keluarga yang mandiri, tenteram dan bahagia Keluarga Berkualitas
2. Meningkatkan implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk
3. Meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
4. Meningkatnya cakupan dan kualitas advokasi KIE, jejaring kemitraan, kinerja petugas lini lapangan dan pengelolaan smart data informasi melalui teknologi
5. Mewujudkan SDM apartaur dan tenaga program bangsa Kencana, penelitian dan pengembangan, serta kerjasama internasional berkualitas
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dilingkungan BKKBN dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik.



3.4. Telaahan Renstra BkbbN Perwakilan Provinsi Riau

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis secara umum sejalan dengan Renstra BkbbN Perwakilan Provinsi Riau karena sama – sama berpedoman kepada Renstra BkbbN Pusat. Namun pada hal tertentu penekanan kegiatannya berbeda – beda yaitu, sejalan dengan kondisi dan masalah serta solusi di daerah dengan menempatkan kearifan lokal.

Renstra BkbbN Perwakilan Provinsi Riau menetapkan strategi yang dilaksanakan untuk pencapaian visi dan misi adalah :

- a. Memantapkan dan mensosialisasikan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- b. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata.
- d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi.
- e. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- f. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang KKB.
- g. Penguatan data dan informasi kependudukan, KB dan KS.

1.4. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana yang pada awalnya mengacu tugas dan kewenangan pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, kebijakan di tingkat nasional untuk Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga adalah:



- Penyusunan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Ketersediaan Data terpilah dan pemanfaatannya dalam perencanaan;
- Program-program Pencegahan, Kuratif dan Rehabilitatif serta Repressif
- Dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antar elemen di pusat dan daerah

Berikut merupakan tabel perbandingan sasaran Renstra Kementerian terkait dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis:

Tabel 3.5
Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

No	Indikator Kinerja Disdalduk&KB	Sasaran Renstra Bkkbn Provinsi	Sasaran pada Renstra Bkkbn Pusat
1.	Menurunnya angka laju pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam peningkatan kualitas Sumber daya Manusia, serta mewujudkan Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan
2.	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)		
3.	Meningkatnya persentase		



	pemakaian alat kontrasepsi (CFR)		
4.	Meningkatnya persentase kesertaan KB baru		
5.	Jumlah kelompok BKB,BKR,BKL dan UPPKS		
6.	Jumlah Persentase bkb,BKR,bkl dan UPPKS yang aktif		
7.	Jumlah Kelompok PIK-R		
8.	Persentase Kelompok PIK-R aktif		

1.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.6.1 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan *Quick Appraisal Method* terdapat 9 (sembilan) isu lingkungan strategis Kabupaten Bengkalis, yaitu:

1. Masih luasnya lahan kritis sebagai akibat adanya pembalakan liar dan tekanan penduduk semakin tinggi terhadap hutan dan lahan untuk penggunaan pertanian atau perkebunan serta manajemen pengelolaan lahan yang buruk;
2. Menurunnya kuantitas dan kualitas air permukaan yang disebabkan meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya sektor permukiman, pertanian, industri dan kegiatan usaha lainnya;



3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan;
4. Belum tertata dan terkelolanya ruang terbuka hijau;
5. Meningkatnya jumlah produksi sampah seiring bertambahnya jumlah penduduk;
6. Penyusutan keanekaragaman hayati akibat perubahan fungsi hutan;
7. Semakin berkurangnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk dan akibat rusaknya hutan;
8. Meningkatnya kerusakan pantai akibat abrasi;
9. Masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga mencemari udara dan menimbulkan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA)

1.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, isu strategis juga merupakan permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.



Daftar Isu Strategis

1. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Relatif tinggi angka Prevalensi Stunting
3. Masi kurang nya Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di lapangan
4. Masi kurang Kader Institusi Masyarkat Pedsaan (IMP)

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap kebijakan pusat dan Provinsi Riau serta permasalahan Perangkat Daerah sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi, misi kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis. Berikut ini adalah isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis:

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas.
2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksidan penyiapan kehidupan berkeluarga.
3. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi.
4. Menata dan memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di desa/kelurahan.

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas melalui :

- a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, baik antar-sektor maupun antara pusat dan daerah,



utamanya dalam sistem jaminan kesehatan nasional dengan menata fasilitas pelayanan KB (ketersediaan dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen penjaminan ketersediaan dan distribusi logistik alokon);

- b. Penyediaan sarana dan prasarana serta distribusi alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskesKB;
- c. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan, dan pelayanan KB secara *mobile* di wilayah sulit; dan
- d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB), serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB.
- e. Penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian, pengembangan Advokasi dan KIE

2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan kehidupan berkeluarga melalui :

- a. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antarsektor dan antara pusat-daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orangtua, teman sebaya, toga/toma, sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi;



- b. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan;
- c. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka; dan
- d. Peningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM kader/penyuluh dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orangtua, serta penguatan lembaga dengan mengembangkan intervensi bersifat lintas sektor (forum koordinasi antara pemerintah dan LSM).

3. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui:

- a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi-KIE tentang KB dan kespro yang sinergi antarsektor dan antara
- b. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang KB dan Kespro oleh aparaturnya dengan melibatkan masyarakat dan keluarga, serta penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan bidan dengan memperhatikan sasaran target masyarakat sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi;
- c. Peningkatan komitmen lintas sektor dan pimpinan daerah tentang pemahaman pentingnya KB dan kesehatan reproduksi;



- d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

4. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan Keluarga Berencana didesa/kelurahan , yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan koordinasi seluruh instansi terkait pembangunan kependudukan yang holistik;
- b. Advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah kecamatan tentang pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;
- c. Literasi dinamika penduduk bagi pengambil kebijakan dan para perencana pembangunan;
- d. Evaluasi tentang efektivitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana setelah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dan UU No. 23 tahun 2014;
- e. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat;
- f. Penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB, BKR,BKL), serta penguatan 8 fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan); dan



g. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.

5. Menurunkan angka prevalensi Stunting

Berdasarkan hasil pemantauan status gizi di setiap Kecamatan pada tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Bengkalis, Persentase Balita Stunting pada tahun 2020 adalah 9,14 dan pada tahun 2021 sebesar 8,43 persen, Isu strategis yang diidentifikasi akan mempengaruhi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pelayanan Program tahun 2021-2026, yaitu **“Belum optimalnya pelayanan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)”**

Berikut merupakan tabel perumusan strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026:

Tabel 3.7.
Perumusan Strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026

No	Aspek permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi dan Program KD dan wakil KD terpilih	Telaahan RTRW / KLHS	Isu-isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Pelayanan Keluarga Berencana	1. Masih terbatasnya tenaga pelayanan yang tersertifikasi 2. Belum terpenuhinya sarana pelayanan yang sesuai standard 3. Tidak sesuai distribusi alokasi dengan kebutuhan masyarakat	Meningkatnya Kualitas penyebaran penduduk dan pengendalian angka kelahiran,	Visi: Terwujudnya Kabupaten yang Bermartabat, Maju dan Sejahtera Misi 2 Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu	Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)	Belum optimalnya pelayanan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)



2.	Permasalahan dalam Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	1. Masih Masih kurang fungsinya penggerakan bagi petugas lapangan dan kader IMP 2. Masih belum maksimalnya pembinaan terhadap IMP 3. Masih belum maksimalnya penyuluhan bagi kader IMP 4. Jumlah petugas lapangan, idealnya satu orang petugas membawahi 2 (Dua) Desa	serta peran aktif masyarakat, generasi berencana dalam mengikuti program KB	Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter 2.1 Mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan menggerakkan serta memperkuat karakteristik masyarakat yang handal dan berdaya saing, dengan bersandarkan pada nilai-nilai Budaya Melayu sehingga terciptanya pelayanan public yang baik dan keharmonisan masyarakat		Kencana)
3.	Permasalahan dalam Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Masih rendahnya kesadaran kader dalam mendukung keberhasilan program 2. Masi minimnya pengetahuan kader dan belum tersedianya sarana pendukung belajar tentang pengetahuan kader 3. Belum berperannya Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan kondisi, kinerja, dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan tujuan yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Tujuan tersebut dijabarkan dengan jelas dalam sasaran dan direalisasikan dalam bentuk indikator sasaran, sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dibutuhkan strategi dan kebijakan yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Keberhasilan tujuan, dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.



4.1. Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Penentuan tujuan perlu mempertimbangkan permasalahan pembangunan dan visi, misi dan program Bupati terpilih. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas melalui :

- a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, baik antar-sektor maupun antara pusat dan daerah, utamanya dalam sistem jaminan kesehatan nasional dengan menata fasilitas pelayanan KB (ketersediaan dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen penjaminan ketersediaan dan distribusi logistik alokon);



- b. Penyediaan sarana dan prasarana serta distribusi alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes KB;
- c. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan, dan pelayanan KB secara *mobile* di wilayah sulit; dan
- d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB), serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.
- e. Penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian, pengembangan Advokasi dan KIE.

2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan kehidupan berkeluarga melalui :

- a. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antarsektor dan antara pusat-daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orangtua, teman sebaya, toga/toma, sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi;
- b. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan;



- c. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka; dan
- d. Peningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM kader/penyuluh dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orangtua, serta penguatan lembaga dengan mengembangkan intervensi bersifat lintas sektor (forum koordinasi antara pemerintah dan LSM).

3. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui:

- a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi-KIE tentang KB dan kespro yang sinergi antarsektor dan antara
- b. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang KB dan Kespro oleh aparatur dengan melibatkan masyarakat dan keluarga, serta penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan bidan dengan memperhatikan sasaran target masyarakat sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi;
- c. Peningkatan komitmen lintas sektor dan pimpinan daerah tentang pemahaman pentingnya KB dan kesehatan reproduksi;
- d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

4. Menata dan memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan Keluarga Berencana didesa/kelurahan, yang dilakukan melalui strategi:



- a. Peningkatan koordinasi seluruh instansi terkait pembangunan kependudukan yang holistik;
- b. Advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah kecamatan tentang pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;
- c. Literasi dinamika penduduk bagi pengambil kebijakan dan para perencana pembangunan;
- d. Evaluasi tentang efektivitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana setelah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dan UU No. 23 tahun 2014;
- e. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat;
- f. Penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB, BKR, BKL), serta penguatan 8 fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan); dan
- g. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.



4.2. Sasaran

Poin-poin Sasaran yang akan digunakan dalam menjalankan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)
7. Meningkatnya Ketahanan Keluarga.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, maka menetapkan indikator kinerja sasaran strategis awal sebagai berikut:



Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA TAHUN KE					KONDISI AKHIR (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
	1. Terwujudnya pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	1. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1. Persentase angka laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,66	1,16	1,11	1,10	1,08	1,07	1,07
			2. Menurunnya Angka Kelahiran Total Fertility Rate (TFR)	2,54	2,41	2,34	2,28	2,23	2,20	2,20
		2. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Mengikuti Program KB	1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCFR)	47,01	47,55	55,57	55,87	56,10	56,50	56,50
			2. Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	20,01	19,97	17,26	16,58	16,10	15,75	15,75
		3. Meningkatkan Kualitas Generasi Berencana	1. Jumlah Kelompok (BKB, BKR, BKL dan UPPKA) yang aktif	30	35	55	60	63	65	65
			2. Persentase Kelompok (BKB, BKR, BKL dan UPPKA)	55	60	65	68	70	75	75



			Aktif	55	60	65	73	75	78	78
			3. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK-R) Aktif							
		4. Meningkatnya kualitas capaian kinerja	1. Predikat akuntabilitas kinerja	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
			2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	100	100	100	100	100	100	100

Untuk mencapai Target yang ditetapkan, diperlukan langkah – langkah perbaikan terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk Tahun 2021-2026, terhadap program kegiatan di Perangkat Daerah sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, diharapkan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat tercapai dan Tata Kelola Pemerintahan menjadi semakin Baik.

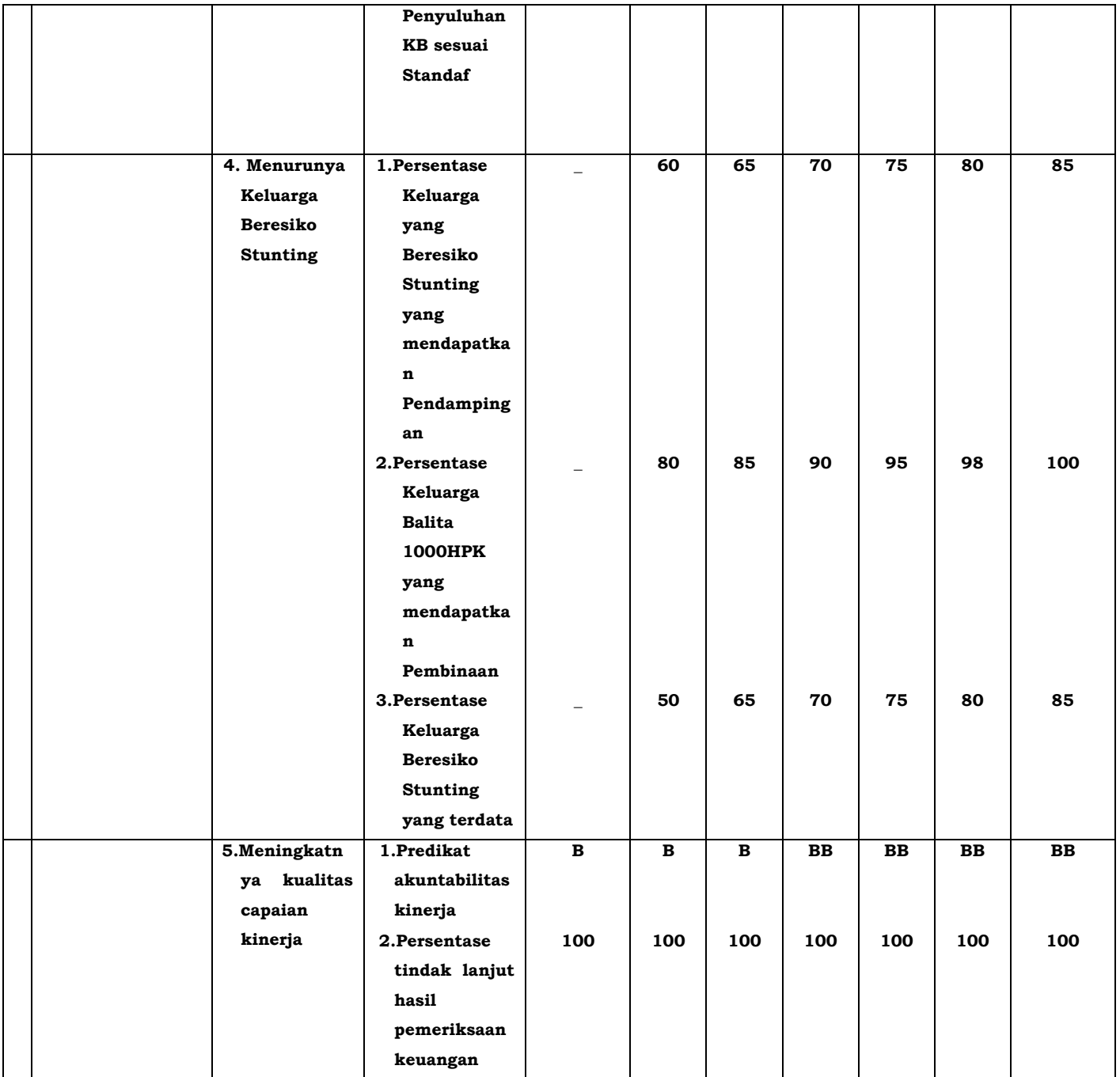
Berikut Perubahan Tabel 4.1 yang direvisi sesuai dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang selaras dengan Pohon Kinerja Perangkat Daerah sebagai Berikut :



Tabel 4.1

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026**

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA TAHUN KE					KONDISI AKHIR (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
	1. Terwujudnya pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	1. Menurunnya Angka Kelahiran Total	1. Total Fertility Rate	2,64	2,14	2,12	2,10	2,08	2,06	2,06
			2. Persentase Peserta KB Aktif	59,00	60,20	61,32	62,55	63,50	64,75	64,75
			3. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/MCPR)	49,00	49,53	49,90	50,40	50,99	51,85	51,85
			4. Persentase Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi MKJP	40,25	50,41	57,05	58,67	59,85	60,78	60,78
		2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Institusi Masyarakat di Pedesaan/Pekotaan	1. Persentase PPKBD/Sub PPKBD Aktif	—	100	100	100	100	100	100
			2. Persentase Penyuluh Lapangan KB Aktif	—	100	100	100	100	100	100
		3. Meningkatkan Kualitas Kelompok Kegiatan Masyarakat	1. Persentase (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS dan UPPKA) aktif	—	100	100	100	100	100	100
			2. Persentase Balai	—	100	100	100	100	100	100





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.



Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1.1. Strategi dan Arah Kebijakan.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang jelas, hal ini merupakan perwujudan dari program-program serta kegiatan yang telah disusun serta dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis adalah merupakan gambaran atau langkah-langkah yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan serta tindakan-tindakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mencapai tujuan yang telah di rumuskan untuk 5 (lima) tahun kedepan melalui penetapan pada prioritas pembangunan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis, Fokus utama penentuan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis adalah :

- A. Tujuan 1 : Menurunkan laju pertumbuhan penduduk
- Sasaran : Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk
- Strategi : Meningkatnya kualitas penyebaran penduduk
- Arah : Optimalkan Pengendalian Penduduk
- Kebijakan



- B. Tujuan 2 : Meningkatkan pengendalian angka kelahiran
Sasaran : Meningkatnya pengendalian angka kelahiran
Strategi : Persentase menurunnya angka kelahiran (TFR)
Arah : Mengintensifkan promosi keluarga berencana
Kebijakan : dan peningkatan kuantitas dan kualitas akses pelayanan keluarga berencana
- C. Tujuan 3 : Meningkatkan peran aktif masyarakat mengikuti program KB
Sasaran : Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB
Strategi : Meningkatnya persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)
Arah Kebijakan : Memanfaatkan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelaksanaan program KB dan keluarga sejahtera
- D. Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Generasi Berencana
Sasaran : Meningkatkan peran Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL dan UPPKA)
Strategi : Meningkatkan Kualitas Generasi Berencana dalam Program KB
Arah Kebijakan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia



Visi, Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 Untuk lebih jelas bisa di lihat pada lampiran tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1

Visi, Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA		
Misi	Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Mewujudkan Perekonomian		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Menurunnya Angka kelahiran Total	Peningkatan Capaian kualitas Peserta KB	Menyediakan data Capaian Peserta KB yang akurat dan tepat waktu
			Mengintensipkan promosi keluarga berencana dan peningkatan kuantitas dan kualitas akses pelayanan keluarga berencana
			Meningkatkan kualitas kampung KB



	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Institusi Masyarakat di Pedesaan/Perkotaan	Meningkatkan Kelembagaan Institusi Masyarakat dalam Pembinaan dan Pelayanan	Penguatan kapasitas program kependudukan dan keluarga berencana
			Memperluas cakupan kerjasama kualitas SDM bagi Penyuluh untuk prgram Bangga Kencana;
	Meningkatnya Kualitas Kelompok Kegiatan masyarakat	Meningkatkan Kualitas Generasi Berencana	Meningkatkan sarana/prasarana pemanfaatan Data Pengendalian Penduduk dan KB di Balai Penyuluhan KB Meningkatkan kualitas SDM



	Menurunkan Keluarga Beresiko Stunting	Menurunkan Keluarga Beresiko Stunting dengan pendampingan Keluarga	Mengoptimalkan Tim Pendampingan Keluarga (TPK) ditingkat Desa/Kelurahan untuk memberikan Pendampingan bagi Keluarga yang Beresiko Stunting
--	---	--	--

Tabel 5.2.

**Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai Dengan Tujuan, Sasaran Jangka
Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Menurunkan Angka kelahiran Total	1 Persentase Peserta KB Aktif	Meningkatnya penyediaan informasi dan data Penduduk dan keluarga Berencana	Penyediaan data kependudukan dan KB yang akurat dan tepat waktu
		2 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)		Mengintensipkan promosi keluarga berencana dan peningkatan kuantitas dan kualitas akses pelayanan keluarga berencana
		3. Persentase Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi MKJP		Mendorong terbentuknya kampung KB



	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Institusi masyarakat di Pedesaan/Perkotaan	1 Persentase PPKBD/Sub PPKBD aktif 2 Persentase Penyuluh Lapangan KB aktif	Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi di seluruh wilayah	Penguatan kapasitas kelembagaan program kependudukan dan keluarga berencana
	Meningkatnya Kualitas kelompok kegiatan Masyarakat	1 Persentase (BKB,BKR,BKL, PIK-R, PPKS dan UPPKA) aktif 2 Persentase Balai Penyuluhan KB sesuai Standar	Meningkatkan kelompok Remaja di setiap wilayah Desa dan Kelurahan	Mendorong agar masyarakat atau generasi muda ikut serta dalam program KB
	Menurunnya Keluarga Beresiko Stunting	1 Persentase Keluarga yang beresiko Stunting yang mendapatkan Pendampingan 2.Persentase Keluarga Balita 1000HPK yang mendapatkan Pembinaan 3.Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang terdata	Menurunkan Keluarga Beresiko Stunting dengan pendampingan Keluarga	Mengoptimalkan Tim Pendampingan Keluarga (TPK) ditingkat Desa/Kelurahan untuk memberikan Pendampingan bagi Keluarga yang Beresiko Stunting



--	--	--	--	--

Berikut merupakan table analisa SWOT pada lampiran table 5.2 sebagai berikut :



TABEL 5.2
ANALISIS SWOT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang (O) ▪ Adanya komitmen Pemerintah pusat untuk menyusun kebijakan tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. ▪ Komitmen pemerintah pusat di dalam penyediaan dana alokasi khusus (DAK) Bidang Kesehatan subbidang Keluarga Berencana. Sehingga sangat membantu Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan peran KKBPK di daerah dengan bantuan DAK untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasana KB. ▪ Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis di buktikan dengan adanya program-program khusus untuk meningkatkan KKBPK di Kabupaten Bengkalis melalui RPJMD 2021-2026. ▪ Adanya jaringan kerja dalam pelaksanaan dinas dari Tingkat Kabupaten sampai Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, RT untuk peningkatan dan menyukseskan program	Tantangan (T) ▪ Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana. ▪ Menurunkan angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang selalu meningkat tiap tahun; ▪ Menurunkan angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun. ▪ Meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR). ▪ Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>). ▪ Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun). ▪ Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS 15-49 tahun. ▪ Pemahaman masyarakat terutama di pedesaan terkait program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga);



	KKBPK, PPKBD dan Sub PPKBD. ▪ Tingginya partisipasi dari faskes-faskes yang ada di Kabupaten Bengkalis. ▪ Kebiasaan /adat untuk menikah di usia muda bagi anak perempuan khususnya di pedesaan. • Kesadaran dari pemuka masyarakat dan tokoh agama pentingnya program KKBPK di Kabupaten Bengkalis. Dilihat dari diaktifkannya FAPSEDU tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.	
Kekuatan (S) • Adanya SOTK, Standar pelayanan dan SOP; • Adanya UPT/Faskes di setiap kecamatan; • Adanya petugas lapangan Keluarga Berencana Desa/Kelurahan); • Adanya Mobile Layanan Program KB; • Adanya New SIGA (Sistem Informasi Keluarga) yang sudah terintegrasi di Balai Penyuluhan KB Kecamatan	Alternatif Strategi (S-O) Peningkatan kualitas SDM terhadap Pelayanan KB	Alternatif Strategi (S-T) Peningkatan SOP dan SP sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kelemahan (W)	Alternatif Strategi (W-O)	Alternatif Strategi (W-T)
• Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pelayanan; • Terbatasnya sarana dan prasarana; • Masih rendahnya komitmen dan integritas sebagian pegawai dalam pembinaan dan penyuluhan Program KB; • Gangguan koneksi jaringan New SIGA (Sistem Informasi Keluarga).	• Pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Keluarag (SIGA) • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana	• Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai Program KB • Peningkatan kesertaan ber KB yang baik..



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang direncanakan untuk periode Tahun 2021-2026 menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 meliputi:

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah . dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Komponen Instansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengendalian Penduduk

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pengendalian Penduduk yang meliputi dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyerasian kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan, keluarga berencana dan KKBPK.
- b. Implementasi Pendidikan kependudukan jalur pendidikan Formal dan non formal



- c. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
- d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- e. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
- f. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan Budaya local
- g. Promosi dan KIE dengan KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang
- h. Pengeloaan Operasioanl dan sarana di balai Penyuluhan KKBPK
- i. Penyediaan sarana pendukung operasioanl PKB/PLKB
- j. Penguatan Pelaksanaan penyuluhan, Pelayanan dan pengembangan program KKBPK
- k. Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)
- l. Pembinaan terpadu kampung KB

III. Program Keluarga Berencana

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
- b. Peningkatan kesertaan pengguna metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
- c. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB



- d. Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
- e. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan
- f. Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

IV. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera , dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam) Rapat kordinasi desa (Rakordes) dan mimi lokakarya (Minilok)
- b. Pengendalian Program KKBPK
- c. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di kampung KB
- d. Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PIK-R dan UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga
- e. Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS
- f. Orintasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS



- g. Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)
- h. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)
- i. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)

Dari Program dan Kegiatan Serta Pendanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 6.1.

Rencana Program dan Kegiatan , Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerin tahan dan Program Prioritas Pemban gunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	14		Bldang Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana																
2	14	02	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peserta KB Aktif	-	59,00	104.630.700	60,2 0	600.000.000	61,3 2	1.900.000.000	62,55	1.450.000.000	63,50	1.900.000.000	64,75	1.900.000.000	64,75	1.900.000.000
			Program Pengendali an Penduduk	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR)	-	49,00		49,53		49,90		50,40		50,99		51,85		51,85	
				Persentase Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi MKJP	-	40,25		50,41		57,05		58,67		59,85		60,78		60,78	
2	14	03	Program Pengendali an Penduduk	Persentase PPKBD/Sub PPKBD Aktif	-	100	4.565.676.430	100	4.875.000.000	100	5.320.5000.000	100	5.444.555.000	100	6.320.500.000	100	6.320.500.000	100	6.320.500.000
				Persentase Penyuluh Lapangan KB Aktif	-	100		100		100		100		100		100		100	
				Persentase Balai Penyuluhan	-	100		100		100		100		100		100		100	



				KB sesuai Standar															
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS dan UPPKA) Aktif	100	100	268.410.300	100	1.700.000.000	100	2.400.000.000	100	2.600.000.000	100	3.400.000.000	100	3.400.000.000	100	3.400.000.000
				Persentase Keluarga yang beresiko Stunting yang mendapatkan Pendampingan	-	60		60		65		70		75		80		80	
				Persentase Keluarga balita 1000 HPK yang mendapatkan Pembinaan	-	80		80		85		90		95		98		100	
				Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang terdata	-	50		50		65		70		75		80		85	



Tabel. 6.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi			
			U	Bid.U	Prog	Keg	Sub				2021		2022		2023		2024		2025				2026		
											Kinerja	RP	Kinerja	RP	Kinerja	RP	Kinerja	RP	Kinerja	RP			Kinerja	RP	
1	2	3	4					5		6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	12	13	12	13	20	21
Terwujudnya Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Persentase Peserta KB Aktif	2	14	01			A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	2	14	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)															
		Persentase Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi MKJP	2	14	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dicetak.		3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	90.000.000		Disdalduk KB

		Persentase PPKBD/SUB PPKBD aktif	2	14	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)															
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Institusi Masyarakat di Pedesaan /Perkotaan	Persentase Penyuluh Lapangan KB Aktif	2	14	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN yang dibayarkan.		43 Orang	7.443.906.642	43 Orang	7.443.906.642	43 Orang	7.443.906.642	43 Orang	7.443.906.642	43 Orang	7.443.906.642	43 Orang	7.443.906.642		Disdalduk KB
			2	14	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)															
	Meningkatnya Kualitas Kelompok Kegiatan Masyarakat	Persentase (BKB,BKR,BKL,PIK-R,PPKS dan UPPKA) Aktif							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan		35 Orang	672.000.000	35 Orang	672.000.000	47 Orang	902.400.000	47 Orang	902.400.000	47 Orang	902.400.000	47 Orang	902.400.000		

[illegible]

			2	14	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Rapat dan Aktivitas Lapangan yang diadakan.		1 Tahun	78.000.000	12 Bulan	141.440.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	
			2	14	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terpenuhi dalam 1 Tahun.		8 Item	95.550.000	10 Item	109.490.400	10 Item	109.490.400	10 Item	109.490.400	10 Item	109.490.400	10 Item	109.490.400	
			2	14	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan.	Jumlah Terbitan Bahan Bacaan (Koran) yang terdistribusi.		20 Eksampler	15.000.000.00	28 Eksampler	41.160.000	35 Eksampler	59.500.000	35 Eksampler	59.500.000	35 Eksampler	59.500.000	35 Eksampler	59.500.000	

			2	14	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi dilakukan koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah.		12 Bulan	302.000.000	12 Bulan	412.348.000	12 Bulan	587.500.000	12 Bulan	650.000.000	12 Bulan	650.000.000	12 Bulan	650.000.000	
			2	14	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Media Online yang tersedia		1 Media	258.950.000	1 Media	238.150.000	1 Media	258.950.000	1 Media	258.950.000	1 Media	258.950.000	1 Media	258.950.000	
			2	14	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Termasuk Pemeliharaan														
			2	14	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia dalam satu tahun		-	-	2 Item	101.600.000	3 Item	200.000.000	3 Item	200.000.000	3 Item	200.000.000	3 Item	200.000.000	

			2	14	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Mobil Operasional yang Diadakan		-	-	-	-	-	1 Unit	750.000.000	1 Unit	750.000.000	1 Unit	750.000.000	
									Pengadaan Mobil Double Cabin.	Jumlah Mobil Double Cabin yang diadakan		-	-	-	-	1 Unit	675.000.000	1 Unit	675.000.000	1 Unit	675.000.000		
			2	14	01	2.07	09		Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun		-	-	-	-	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000		
			2	14	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Tahun	105.000.500	10 Buah/Unit	220.403.000	10 Buah/Unit	220.403.000	10 Buah/Unit	220.403.000	10 Buah/Unit	220.403.000		
			2	14	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Papan Nama / Bangunan Lainnya.		-	-	-	-	1 Paket/	200.000.000	1 Paket/	200.000.000	1 Paket	200.000.000		

			2	14	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang														
			2	14	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Dalam 1 (satu) Tahun 2. Jumlah Jasa Tenaga Administrasi yang dibayarkan.		1250 lembar	6,450,000	1.(1.300 Lembar) 2. (8 Orang)	173.820.000	1.(1.300 Lembar) 2. (8 Orang)	173.820.000	1.(1.300 Lembar) 2. (10 Orang)	217.020.000	1.(1.300 Lembar) 2. (10 Orang)	217.020.000	1.(1.300 Lembar) 2. (10 Orang)	217.020.000	
			2	14	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang dibayarkan.		12 Bulan	195.500.000	12 Bulan	271.488.000	12 Bulan	271.488.000	12 Bulan	271.488.000	12 Bulan	271.488.000	12 Bulan	271.488.000	

			2	14	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Tenaga Supir Yang disediakan.		5 Orang	96.000.000	5 Orang	106.860.000	5 Orang	106.860.000	5 Orang	106.860.000	5 Orang	106.860.000	
			2	14	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Termasuk Pemeliharaan												
			2	14	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara Secara Rutin/Be rkala .		7 Unit	295.370.000	7 Unit	295.370.000	7 Unit	295.370.000	7 Unit	295.370.000	7 Unit	295.370.000	

			2	14	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara Secara Rutin/Berkala.		7 Unit	215.000.500	7 Unit	295.370.000	7 Unit	295.370.000	7 Unit	295.370.000	7 Unit	295.370.000	
			2	14	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Tenaga Kerja yang terdapat dalam 1 (satu) tahun.		1. (7 Item) 2. (12 Orang)	280.400.000	12 Orang	230.400.000	12 Orang	230.400.000	17 Orang	326.400.000	17 Orang	326.400.000	
			2	14	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	1. Jumlah Gedung yang dirahibilitasi/diperbaiki 2. Jumlah Peralatan kantor yang diservise setiap tahun.		1 Tahun	155.500.000	7 Unit/Buah	203.760.000	7 Unit/Buah	203.760.000	7 Unit/Buah	203.760.000	7 Unit/Buah	203.760.000	

										Kependudukan (GD PK)														
			2	14	02	2.02	08		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK di sector lain	Dibentuknya rumah data kependudukan di kampung KB		-	-	2 unit	100.000.000	4 unit	200.000.000	5 unit	300.000.000	8 unit	400.000.000	10 unit	500.000.000	
			2	14	02	2.01	10		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Terwujudnya Proses belajar mengajar yang mengintegrasikan Pendidikan Bangsa Kencana		-	-	330 orang	104.110.000	330 orang	104.110.000	330 orang	104.110.000	330 orang	104.110.000	330 orang	104.110.000	
			2	14	02	2.	02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tersedianya Pengolahan Data dan Pelaporan														

			2	14	03	2	01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tersedianya materi Advokasi bagi mitra kerja		-	-	1 Kegiatan	4.375.000	1 Kegiatan	4.375.000	1 Kegiatan	4.375.000	1 Kegiatan	4.375.000	1 Kegiatan	4.375.000	
			2	14	03	2	01	02	Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Terlaksananya Jumlah acara Penganangan IBL-KKBPK-Kes dan PKK-KKBPK-Kes		-	-	3 Kegiatan	280.901.000	3 Kegiatan	280.901.000	3 Kegiatan	280.901.000	3 Kegiatan	280.901.000	3 Kegiatan	280.901.000	
			2	14	03	2	01	04	Promosi dan KIE melalui Media Masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Tersedianya informasi program KKBPK		-	--	1 Kegiatan	70.640.000	1 Kegiatan	70.640.000	1 Kegiatan	70.640.000	1 Kegiatan	70.640.000	1 Kegiatan	70.640.000	
			2	14	03	2	01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional program KKBPK melalui rapat Kordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Kordinasi Desa (Rakordes) dan mini lokakarya (minilok)	Terlaksananya mini lokakarya Kecamatan		-	-	11 Kecamatan	171.600.000	11 Kecamatan	171.600.000	11 Kecamatan	171.600.000	11 Kecamatan	171.600.000	11 Kecamatan	171.600.000	

2	14	03	2	01	07	Pengelolaan Operasional dan sarana di balai Penyuluhan KKBPK	Tersedianya Operasional dan sarana di Balai		-	-	12 bln	283.500.000	12 bln	283.500.000	12 bln	283.500.000	12 bln	283.500.000	12 bln	283.500.000	
2	14	03	2	01	08	Pengendalian Program KKBPK	Tersedianya Audit Kasus Stunting		-	-	8 Kali	71.852.200	8 Kali	71.852.200	8 Kali	71.852.200	8 Kali	71.852.200	8 Kali	71.852.200	
2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Jumlah tenaga PKB/PLKB yg tersedia di lapangan														
2	14	03	2	02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Persentase jumlah tenaga PKB/PLKB yang ada dilapangan		22 org	40.500.000	53 orang	50.194.200	53 orang	50.194.200	53 orang	50.194.200	53 orang	50.194.200	53 orang	50.194.200	
2	14	03	2	02	03	Penguatan Pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk	Terpenuhinya pembayaran honorarium petugas Lapangan KB di		22 org	660.000.000	52 org	1.919.977.600	52 org	1.919.977.600	79 org	2.669.977.600	100 org	3.299.977.600	100 org	3.299.977.600	

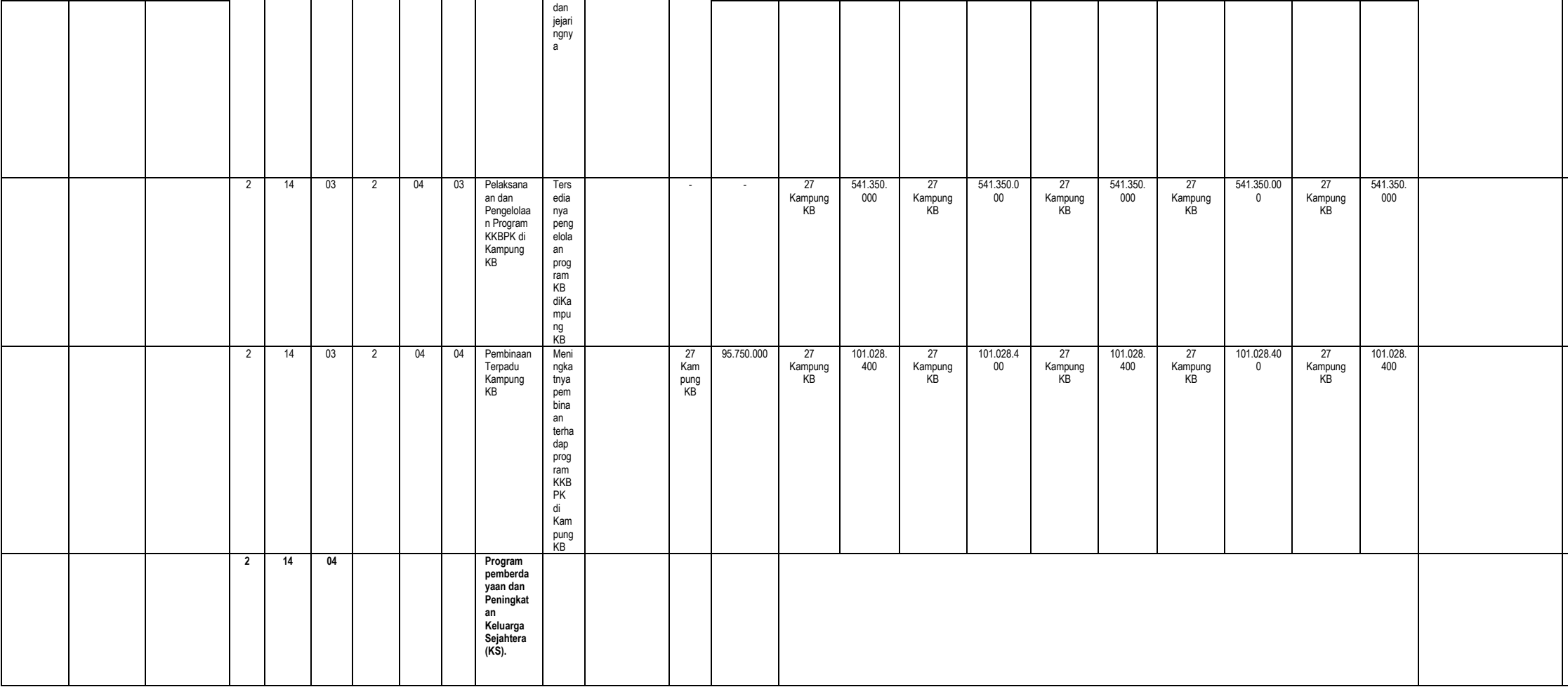
									petugas Keluarga berencana/ Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab Ben gkali s														
			2	14	03	2	02	04	Penggerak an Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terla ksan anya pera n dan tuga s IMP dal penc apai an prog ram Ban gga Kenc ana di Des a/Kel		-	-	155 Desa/Kel	744.000. 000	155 Desa/Kel	744.000.0 00	155 Desa/Kel	744.000. 000	155 Desa/Kel	744.000.00 0	155 Desa/Kel	744.000. 000	
			2	14	03	2	02	10	Penyediaa n Data dan Informasi Keluarga	Terla ksan anya pem anfa atn Data hasil Pem ukta hiran Data kelu arga		-	-	1 Dokumen	200.000. 000	1 Dokumen	200.000.0 00	1 Dokumen	200.000. 000	1 Dokumen	200.000.00 0	1 Dokumen	200.000. 000	
			2	14	03	2	02	04	Pemetaan Kependudu kan	Terla ksan anny a Pem etaa n Kep endu duka n		-	-	1 Dokumen	200.000. 000	1 Dokumen	200.000.0 00	1 Dokumen	200.000. 000	1 Dokumen	200.000.00 0	1 Dokumen	200.000. 000	

			2	14	03				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Perserta se terpe nuhi nya pem bina an Kelu arga Bere ncan a													
			2	14	03	2	03		Pengendali an dan Pendistribus ian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaa n KB di Daerah Kabupaten/ Kota														
			2	14	03	2	03	01	Pengendali an dan Pendistribus ian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Ters alurn ya alok on dan sara na penu njan g alok on ke fasilit as kese hata n pela yana n KB		21 Faskes	209.498.648	21 Faskes	209.498.648	21 Faskes	209.498.648	21 Faskes	209.498.648	21 Faskes	209.498.648		

			2	14	03	2	03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Meningkatnya kualitas pelayanan KB dan persentase KB aktif terhadap PUS di Kab Bengkalis		-	-	1320 orang	1.145.419.100	1320 orang	1.145.419.100	1320 orang	1.145.419.100	1320 orang	1.145.419.100	1320 orang	1.145.419.100	
			2	14	03	2	03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya sarana dan prasarana program KB dalam 1 tahun		1 kegiatan	1.096.400.000	1 kegiatan	2.237.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2	14	03	2	03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringannya	Meningkatnya persentase kesehatan KB di pelayanan KB melalui petugas klinik		100 org	40.500.000	100 org	49.600.000	100 org	49.600.000	100 org	49.600.000	100 org	49.600.000	100 org	49.600.000	

										KB, Dokt er dan bida n Praa ktek Man diri														
			2	14	03	2	03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi ,serta hak hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan kelompok kegiatan	Meni ngka tnya peng etah uan kese hata n repr oduk si mas yara kat Des a bagi pasa ngan usia subu r (PU S) utk meni ngka tkan capa ian akse ptor KB		-	-	330 org	46.750.0 00	330 org	46.750.00 0	330 org	46.750.0 00	330 org	46.750.000	330 org	46.750.0 00	
			2	14	03	2	03	10	Peningkata n Kompetens i Tenaga Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meni ngka tnya kuali tas tena ga medi s dan para medi s untu k meni noka		-	-	45 Org	340.000. 000	45 Org	340.000.0 00	45 Org	340.000. 000	45 Org	340.000.00 0	45 Org	340.000. 000	

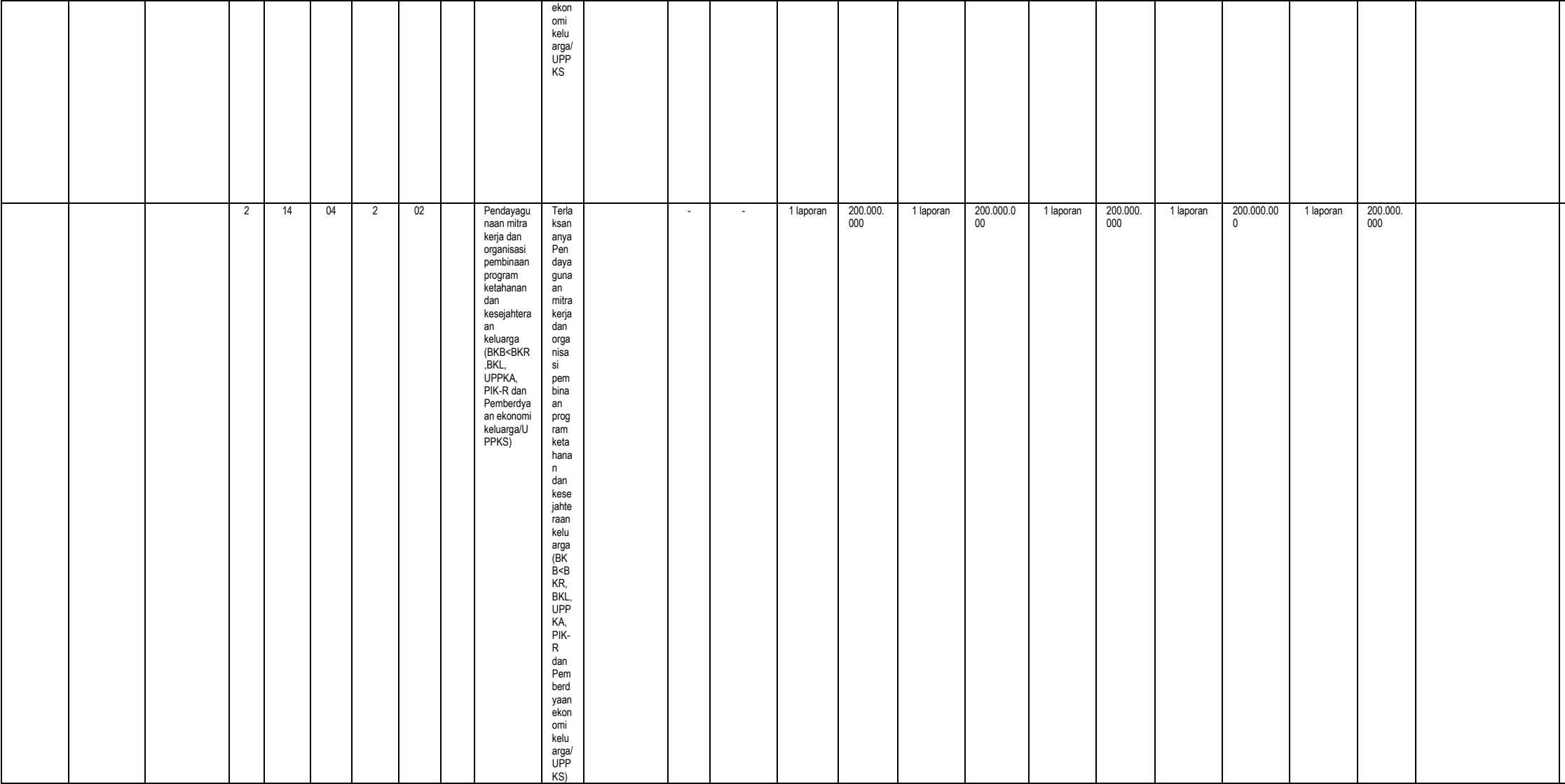
			2	14	03	203	09		Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak hak reproduksi di Fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	Terlaksanaan Pro mosi dan kons eling kese hata n repr oduk si serta hak hak repr oduk si di Fasil itas kese hata n dan kelo mpo k kegi atan	-	-	5 Orang	100.000.000	10 Orang	200.000.000	15 Orang	200.000.000	20 Orang	300.000.000	25 Orang	300.000.000	
			2	14	03	203	08		Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Terlaksanaan Pelayan an Pem bina an pela yana n kelu arga bere ncan a dan kese hata n repr oduk si di fasilit as kese hata n term asuk jaring an	-	-	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	



									l bagi pengelola dan pelaksana(kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomimk eluarga/UP PKS)	terpe nuhi nya Oper asio nal Pen urun an Stan ting												
			2	14	04	2	01	07	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/U PPKS)	Juml ah kade r kelo mpo k kegi atan yang dibin a		-	-	330 orang	153.985.200	330 orang	153.985.200	330 orang	153.985.200	330 orang	153.985.200	
			2	14	04	2	01	08	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi Ormaw Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta pengelolaa n keuangan keluarga)	Juml ah rema ja yang ikut ajan g Pres tasi Rem aja		-	-	135 orang	246.782.800	135 orang	246.782.800	135 orang	246.782.800	135 orang	246.782.800	

			2	14	04	2	01	08	Penyediaan dan pengembangan materi IPK	Tersedianya Penyediaan dan pengembangan materi IPK		-	-	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	
			2	14	04	2	01	11	Advokasi dan Promosi IPK	Terlaksananya Advokasi dan Promosi IPK		-	-	20 orang	200.000.000	20 orang	200.000.000	20 orang	200.000.000	20 orang	200.000.000	20 orang	200.000.000	
			2	14	04	2	01	12	Soisalisasi IPK	Terlaksananya Soisalisasi IPK		-	-	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	

			2	14	04	2	01	12	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB-BKR, BKL, UPPKA, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Penguatan Kebijakan akan Daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB-BKR, BKL, UPPKA, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)		-	-	1 Organisasi	200.000.000	1 Organisasi	200.000.000	1 Organisasi	200.000.000	1 Organisasi	200.000.000	1 Organisasi	200.000.000	
--	--	--	---	----	----	---	----	----	--	---	--	---	---	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--





			2	14	04	2	03		Pelaksana an peningkat an kapasitas mitra dan organisasi kemasyara katan dalam pengelolaa n program ketahanan dan kesejahtera an keluarga (BKB<BKR ,BKL, UPPKA, PIK-R dan Pemberdya an ekonomi keluarga/U PPKS)	Terla ksan anya Pela ksan aan peni ngka tan kapa sitas mitra dan orga nisa si kem asya rakat an dala m peng elola an prog ram keta hana n dan kese jahte raan kelu arga (BK B<B KR, BKL, UPP KA, PIK- R dan Pem berd yaan ekon omi kelu arga/ UPP KS)		-	-	1 Organisa si	200.000. 000	2 Organisasi	300.000.0 00	2 Organisasi	300.000. 000	3Organisas i	300.000.00 0	3 Organisasi	400.000. 000	
--	--	--	---	----	----	---	----	--	--	--	--	---	---	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--



			2	14	04	2	04		Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Terlaksanaan ya Pro mosi dan sosi alisa si prog ram keta hana n dan kese jahte raan kelu arga bagi mitra kerja		-	-	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	
													12,847,276,290.00		26,127,231,830.00		26,189,269,390.00		28,101,061,390.00		29,082,061,390.00		29,332,061,390.00	



Tabel 6.3.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021-2026

RPJMD 2021-2026					RENSTRA DISDALDUK DAN KB		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Bidang
Terwujudnya Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 2. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Mengikuti Program KB 3. Meningkatkan Kualitas Generasi Berencana	1. Persentase angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) 2. Menurunnya angka kelahiran total fertility Rate (TFR) 3. Persentase Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /MCFR) 3. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmed Net) 4. Jumlah Pesentase (BKB,BKR,BK L dan UPPKA) aktif 5. Persentase Kelompok (BKB,BKR,BK L dan UPPKA)yang aktif 6. Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Peningkatan layanan publik melalui Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan kelembagaan nya dalam mewujudkan pelayanan publik efektif, efisien dan proporsional	Penyediaan Pengendalian Penduduk dan Keluargan Berencana yang berkualitas	Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya angka laju pertumbuhan Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan



						Menurunnya angkakelahiran Total (TFR)	
					Program Pembinaan Keluarga Berencan (KB)	Persentase Pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	Bidang Keluarga Berencana
						Persentase Kesertaan ber KB	
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKA) yang aktif	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
						Persentase Kelompok PIK-R aktif	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dalam tabel 7.1 untuk penyelenggaraan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bengkalis indikator kinerja yang memacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	2.	3	4	5	6	7	8			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Terwujudnya Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Meningkatnya peran pengendalian pertumbuhan penduduk	1 Persentase angka laju pertumbuhan penduduk	100			1,66			1,16			1,11			1,10			1,08			1,07		
			2 Persentase menurunnya angka kelahiran (TFR)	100			2,54			2,41			2,34			2,28			2,23			2,20		
		Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB	1 Persentase Pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCFR)	100			47,01			47,55			55,57			55,87			56,10			56,50		
			2 Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet Ned)	100			20,01			19,97			17,26			16,58			16,10			15,75		
			3 Jumlah Kelompok (BKB,BKR, BKL dan UPPKA) aktif				30			35			55			60			63			65		

		Meningkat Kualitas Generasi Berencana	1	Persetase kelompok (BKB,BKR, BKL dan UPPKA0 yang aktif	100			55			60			65			68			70			75		
			2	Persentase Kelompok PIK- R aktif	100			55			60			65			68			70			78		
2.	Meningkatkan Capaian Akuntabilitas kinerja dan Keuangan.	Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja.	1	Predikat Akuntabilitas kinerja.	100			B			B			BB			BB			BB			BB		



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Secara umum, isi dokumen ini merupakan rangkaian program dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup kota. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU, DAN SEJAHTERA”

Bengkalis, Maret 2024



KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

H. HAMBALI, S.Pd.I

Pembina TK. I

NIP. 196703051981111001